

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2014 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 (*Netto*) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.802.273.167.768 atau mencapai 127,75% dari estimasi pendapatan sebesar Rp7.672.922.667.950.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 (*Netto*) sebesar Rp47.471.735.913.892 atau mencapai 94,27% dari alokasi anggaran sebesar Rp50.355.789.266.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut :

*Tabel 1.*

*Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013*

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	7.672.922.667.950	9.802.273.167.768	127,75	7.840.288.730.159
Belanja Negara	50.355.789.266.000	47.471.735.913.892	94,27	35.360.482.272.617

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp43.292.412.473.529 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp5.619.539.386.566, Aset Tetap (*Netto*) setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp36.369.065.361.645, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih dan akumulasi penyusutan/amortisasi masing-masing sebesar Rp748.643.516 dan Rp1.303.059.081.802.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.016.936.107.723.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp42.275.476.365.806 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp4.602.603.278.843 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp37.672.873.086.963.

Pada tahun 2014 terdapat peningkatan nilai aset sebesar Rp1.195.968.288.253 atau meningkat 2,84%, dengan rincian :

- Aset Lancar, meningkat sebesar Rp1.060.785.703.933
- Aset Tetap (Nilai Buku), meningkat sebesar Rp766.120.219.995
- Piutang Jangka Panjang (*Netto*), meningkat sebesar Rp243.669.196
- Sedangkan Aset Lainnya (*Netto*), menurun sebesar Rp631.181.304.871

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut :

*Tabel 2.*  
*Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013*

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	5.619.539.386.566	4.558.753.682.633	1.060.785.703.933	23,27
Aset Tetap	36.369.065.361.645	35.602.945.141.650	766.120.219.995	2,15
Piutang Jangka Panjang	748.643.516	504.974.320	243.669.196	48,25
Aset Lainnya	1.303.059.081.802	1.934.240.386.673	(631.181.304.871)	(32,63)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>43.292.412.473.529</b>	<b>42.096.444.185.276</b>	<b>1.195.968.288.253</b>	<b>2,84</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	1.016.936.107.723	4.563.843.203.608	(3.546.907.095.885)	(77,72)
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	4.602.603.278.843	(5.089.520.975)	4.607.692.799.818	(90532,94)
Ekuitas Dana Investasi	37.672.873.086.963	37.537.690.502.643	135.182.584.320	0,36
Jumlah Ekuitas Dana	42.275.476.365.806	37.532.600.981.668	4.742.875.384.138	12,64
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>43.292.412.473.529</b>	<b>42.096.444.185.276</b>	<b>1.195.968.288.253</b>	<b>2,84</b>

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

### 3.1. Informasi penting Pelaksanaan anggaran

- 1) Anggaran Belanja Kemenkes TA 2014 menurut data Biro Perencanaan dan Anggaran sesuai surat Nomor PR.03.01/4/0557/2015 tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp50.327.639.271.000 dan data SAI sebesar Rp50.355.789.266.000 atau jumlah anggaran menurut data SAI lebih tinggi sebesar Rp28.149.995.000 disebabkan data Biro Perencanaan dan Anggaran belum menyajikan sesuai data terakhir (hasil audited).

Adapun Satker yang mengalami penambahan anggaran yaitu :

- Pusat Penanggulangan Krisis, bertambah sebesar Rp1.450.005.000
- RS Cipto Mangunkusumo, bertambah sebesar Rp8.399.893.000
- Balai Besar Labkes Surabaya, bertambah sebesar Rp3.600.165.000
- Direktorat BUK Jiwa, bertambah sebesar Rp661.879.000
- Dinkes Kabupaten Subang, bertambah sebesar Rp1.000.000.000
- Pusat Humaniora Kebijakan Kes, bertambah sebesar Rp9.305.477.000
- Poltekkes Semarang, bertambah sebesar Rp3.732.576.000

- 2) Jumlah Satker Kemenkes TA 2014 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 1.428 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp50.355.789.266.000. Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA. 2014.

Jumlah DIPA sebanyak 1.428 Satker, dengan rincian sesuai Jenis Kewenangan dan hubungan kerja dengan KPPN, yaitu : Kantor Pusat (KP) sebanyak 46 Satker, Kantor Daerah (KD) sebanyak 168 Satker, Dekonsentrasi (DK) sebanyak 183 Satker, Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1.031 Satker.

- 3) Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.

### 3.2. Informasi penting terkait Penyusunan Laporan Keuangan TA 2014

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Kantor Daerah (UPT) dan Dekonsentrasi seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dari :
  - Satuan Kerja → Wilayah → Eselon I → Kementerian Kesehatan.
  - Satker Kantor Pusat → Eselon I → Kementerian Kesehatan.
  - Satker Tugas Pembantuan → Eselon I → Kementerian Kesehatan.
- 2) Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 162/Menkes/SK/V/2014 tentang Pembentukan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes, sedangkan Unit Akuntansi Wilayah Dekonsentrasi dibentuk oleh masing-masing Kepala Daerah (Gubernur) atau Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- 3) Unit Akuntansi tingkat Eselon I, pembentukannya menjadi tanggungjawab yang melekat bagi Pejabat Eselon I terkait untuk setiap tahun anggaran menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B-E1) Eselon I dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Permenkes Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

- 4) Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam proses penyusunan laporan keuangan tahun 2014 telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal yang mencakup seluruh jenjang pelaporan.
- 5) Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan barang milik negara di tingkat Satuan Kerja, telah dilakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tatacara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

### **3.3. Beberapa Surat dan Edaran oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2014.**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; Agar beberapa ketentuan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Penatausahaan BMN TA 2014.
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-256/PB/2014 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- 9) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PER-1/KN/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PER-07/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 10) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014.
- 11) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9279/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015.

- 12) Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1924/KN/2014 hal Persiapan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2014.
- 13) Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2015 tanggal 02 Januari 2015 hal *Louchning* Aplikasi Koreksi Penyusutan dan Update Aplikasi SIMAK-BMN Tingkat Satuan Kerja.
- 14) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-182/PB/2015 tanggal 09 Januari 2015 hal Perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA dan Pengesahan/Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Surat Berharga serta Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014.
- 15) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-280/PB/2015 tanggal 13 Januari 2015 hal Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2014.
- 16) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1552/PB/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Petunjuk Teknis Penyesuaian Administratif atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan TA 2014 pada Kementerian/Lembaga dan BUN.
- 17) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendahaan Nomor S-2333/PB.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 hal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Pengesahan Hibah TA 2014.
- 18) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-2797/PB/2015 tanggal 7 April 2015 hal Persiapan Dispensasi Penyelesaian Revisi DIPA, Pengesahan SP2HL, SP4HL, MPHL-BJS, SP3-BLU, SPM-GUP Nihil/PTUP, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan TA 2014 Setelah Tripartit.
- 19) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-2915/PB/2015 tanggal 10 April 2015 hal Dispensasi Revisi Pagu Minus DIPA, Pengesahan Hibah Langsung dan Koreksi Data SP2HL, SP4HL, MPHL Transaksi Keuangan TA 2014.

**3.4. Beberapa Edaran, Surat, Peraturan dan Kebijakan telah diterbitkan oleh Kemenkes untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2014.**

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 162/MENKES/SK/V/2014 tentang Pembentukan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/406/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dan Inspektur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan Menandatangani Dokumen Persyaratan Hibah Barang Milik Negara.
- 3) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/III/033/2015 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2014.
- 4) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KN.01.01/III/1362/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan.
- 5) Surat Menteri Kesehatan Nomor PL.02.03/III/619/2014 tanggal 10 April 2014 hal Hibah BMN Pengadaan Pusat yang Diserahoperasikan kepada Pihak Ketiga.

- 6) Surat Sekretaris Jenderal Nomor KN.02.01/4/162/2014 tanggal 24 Januari 2014 hal Tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
- 7) Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KU.02.02/2/902/2014 tanggal 14 April 2014 hal Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA, Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU, Penerbitan SPHL dan MPHL-BJS kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
- 8) Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.01/III/1106/2014 tanggal 7 Juli 2014 hal Hasil Audit Laporan Keuangan Kemenkes TA 2013 dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2014.
- 9) Surat Sekretaris Jenderal Nomor KN.02.01/4/209/2014 tanggal 15 September 2014 hal Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara.
- 10) Surat Sekretaris Jenderal Nomor KN.02.01/4/2685/2014 tanggal 19 November 2014 hal Format Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Tahun 2014.
- 11) Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.02.02/2/229/2015 tanggal 29 Januari 2015 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2014.
- 12) Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.02.02/2/661/2015 tanggal 10 April 2015 hal Permohonan Perpanjangan Dispensasi dan Penyesuaian Batas Waktu Penyusunan Laporan Keuangan.

**3.5. Kejadian Penting setelah tanggal 31 Desember 2014, antara lain :**

- 1) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2014, sebesar Rp2.696.073.142 atau 93,71% dari jumlah yang harus disetor sebesar Rp2.877.171.077.
- 2) Telah dilakukan proses penarikan kembali atas kelebihan setor dana UP pada Satker RS Pusat Otak Nasional sebesar Rp73.469.500, dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala KPPN Jakarta VII sesuai surat nomor KEP-033/WPB.12/0182/2015 tanggal 3 Maret 2015.
- 3) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas saldo kas di Bendahara Penerimaan yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2014, sebesar Rp793.911.133 atau 100% telah disetor seluruhnya ke Kas Negara.
- 4) Sebagai tindak lanjut pertemuan tiga pihak antara Kemenkeu, Kemenkes dan BPK yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2015, sudah dilakukan :
  - a) Pemantauan lebih lanjut atas proses pengesahan belanja hibah langsung dan pengesahan pendapatan/belanja BLU.
  - b) Perhitungan koreksi penyusutan pada aplikasi SIMAK-BMN, sebagai akibat dari perubahan kebijakan terhadap dasar perhitungan penyusutan atas BMN yang dibeli sebelum tahun 2005.
  - c) Penelusuran surat setoran bukan pajak (SSBP) atas setoran dana Jamkesmas sesuai hasil reviu BPKP, yaitu :



- (1) Setoran dana Jamkesmas (Dasar dan Rujukan) oleh PPK (Dinkes Kab/Kota, Rumah Sakit Vertikal/Daerah, Balai, Yayasan) setelah Saldo Dana Jamkesmas Tahun 2013 pada masing-masing PPK ditetapkan oleh BPKP, akan mengurangi Saldo “Dana Dibatasi Penggunaannya”, pada Neraca per 31 Desember 2014.
- (2) Atas setoran tersebut (termasuk jasa gironya) dicatat sebagai PNPB Kemenkes tahun 2014.
- d) Pemutakhiran data mutasi saldo “Dana Dibatasi Penggunaannya” selama tahun 2014 dan Saldo Dana Jamkesmas yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2014.
- 5) Telah dilakukan Rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dengan DAPK Kemenkeu sesuai BA Nomor BAR-120/KL/12/PB.64/2015, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.  
Rekonsiliasi SAU >< SAI - TA 2014

No	Uraian	SAU (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	50.355.789.266.000	50.355.789.266.000	0
2	LRA Belanja	47.593.821.360.630	47.583.671.296.413	10.150.064.217
3	LRA Pengembalian Belanja	100.280.641.179	111.935.382.521	(11.654.741.342)
4	Estimasi Pendapatan	7.505.467.033.544	7.672.922.667.950	(167.455.634.406)
5	LRA Pendapatan	9.836.710.304.304	9.802.284.689.004	34.425.615.300
6	LRA Pengembalian Pendapatan	1.274.664.034	11.521.236	1.263.142.798

Keterangan :

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SAU sampai dengan Desember Tahun 2014 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pagu Anggaran, SAU sebesar Rp50.355.789.266.000 sedangkan SAI/SA-BUN sebesar Rp50.355.789.266.000  
Tidak terdapat perbedaan data antara SAU dan SAI/SA-BUN.
- b) Estimasi Pendapatan, SAU sebesar Rp.7.505.467.033.544, sedangkan SAI/SA-BUN sebesar Rp.7.672.922.667.950  
Terdapat perbedaan data antara SAU dan SAI/SA-BUN sebesar Rp167.455.634.406 karena data estimasi SAU belum update.
- c) Laporan Realisasi Belanja, SAU sebesar Rp47.593.821.360.630, sedangkan SAI/SA-BUN sebesar Rp47.583.671.296.413.  
Terdapat perbedaan data antara SAU dan SAI/SA-BUN sebesar Rp10.150.064.217 disebabkan :
- (1) Selisih pencatatan koreksi belanja sebesar Rp611.797.317
  - (2) SP3B BLU yang dibatalkan, sebesar Rp8.355.820.696
  - (3) Transaksi belanja yang tidak dicatat di SAI karena sebab lain sebesar Rp1.182.446.204

- d) Pengembalian Belanja, SAU sebesar Rp100.280.641.179, sedangkan SAI/SA-BUN sebesar Rp111.935.382.521.

Terdapat perbedaan data antara SAU dan SAI/SA-BUN sebesar Rp11.654.741.342 yang terutama disebabkan oleh setoran pengembalian belanja dengan kode BAES1 kosong sehingga tidak terbukukan di BA 024.

- e) Realisasi Pendapatan Bukan Pajak, SAU sebesar Rp9.836.710.304.304, sedangkan SAI/SA-BUN sebesar Rp9.802.284.689.004.

Terdapat perbedaan data antara SAU dan SAI/SA-BUN sebesar Rp34.425.615.300 yang terutama disebabkan oleh setoran pendapatan PNPB yang tidak dicatat di SAI sebesar Rp34.315,817.953.

- f) Pengembalian Pendapatan, SAU sebesar Rp1.274.664.034, sedangkan SAI/SA-BUN sebesar Rp11.521.236.

Terdapat perbedaan data antara SAU dan SAI/SA-BUN sebesar Rp1.263.142.798 yang terutama disebabkan perbedaan pencatatan koreksi pendapatan.

- 6) Telah dilakukan Rekonsiliasi Internal atas data BMN pada SAK dan SIMAK-BMN, dengan hasil sebagai berikut :

*Tabel 4.*  
*Rekonsiliasi BMN SAK dan SIMAK BMN TA 2014*

KOD AKUN	URAIAN AKUN	KEMENTERIAN KESEHATAN		
		SAK	SIMAK-BMN	SELISIH
117	PERSEDIAAN	1.640.259.072.558	1.664.496.314.158	(24.237.241.600)
	<b>PERSEDIAAN</b>	<b>1.640.259.072.558</b>	<b>1.664.496.314.158</b>	<b>(24.237.241.600)</b>
131	TANAH	13.584.546.219.036	13.584.546.219.036	-
132	PERALATAN DAN MESIN	23.716.851.359.296	23.716.851.359.296	-
133	GEDUNG DAN BANGUNAN	10.434.975.360.271	10.434.975.360.271	-
134	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	557.023.830.092	557.023.830.092	-
135	ASET TETAP LAINNYA	214.439.013.778	214.439.013.778	-
136	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2.736.308.202.841	2.736.308.202.841	-
	<b>ASET TETAP SEBELUM PENYUSUTAN</b>	<b>51.244.143.985.314</b>	<b>51.244.143.985.314</b>	<b>-</b>
137	AKUMULASI PENYUSUTAN	(14.875.078.623.669)	(14.875.078.623.669)	-
	<b>ASET TETAP SETELAH PENYUSUTAN</b>	<b>(14.875.078.623.669)</b>	<b>(14.875.078.623.669)</b>	<b>-</b>
162	ASET TIDAK BERWUJUD	144.335.155.657	144.335.155.657	-
166	ASET LAIN-LAIN	3.108.096.201.000	11.720.413.952.465	(8.612.317.751.465)
	<b>ASET LAINNYA SEBELUM PENYUSUTAN</b>	<b>3.252.431.356.657</b>	<b>11.864.749.108.122</b>	<b>(8.612.317.751.465)</b>
169	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2.002.528.379.785)	(8.643.299.549.480)	6.640.771.169.695
	<b>ASET LAINNYA SETELAH PENYUSUTAN</b>	<b>1.249.902.976.872</b>	<b>3.221.449.558.642</b>	<b>(1.971.546.581.770)</b>
	<b>TOTAL ASET SEBELUM PENYUSUTAN</b>	<b>56.136.834.414.529</b>	<b>64.773.389.407.594</b>	<b>(8.636.554.993.065)</b>
	<b>TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(16.877.607.003.454)</b>	<b>(23.518.378.173.149)</b>	<b>6.640.771.169.695</b>
	<b>TOTAL ASET SETELAH PENYUSUTAN</b>	<b>39.259.227.411.075</b>	<b>41.255.011.234.445</b>	<b>(1.995.783.823.370)</b>

Berdasarkan data tersebut di atas secara total terdapat perbedaan total aset setelah penyusutan **SAK lebih rendah** dari SIMAK-BMN sebesar Rp.1.995.783.823.370 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) **Persediaan**, data SAK sebesar Rp1.640.259.072.558 dan SIMAK-BMN sebesar Rp1.664.496.314.158 atau terdapat perbedaan **SAK lebih rendah** sebesar Rp24.237.241.600, perbedaan ini disebabkan karena terdapat barang persediaan dan/atau BMN yang diserahkan ke Pemerintah Daerah yang tidak disajikan dalam aplikasi SAK namun tetap disajikan pada SIMAK-BMN, terjadi pada :



- (1) Satker Direktorat PPBB Ditjen PP dan PL, data SAK sebesar Rp26.819.756.170 dan SIMAK-BMN sebesar Rp49.601.597.770 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp22.781.841.600.
  - (2) Satker Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes, data SAK sebesar Rp6.342.127 dan SIMAK-BMN sebesar Rp1.461.742.127 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp1.455.400.000.
- b) **Aset Tetap**, sebelum penyusutan data SAK sebesar Rp51.244.143.985.314 dan SIMAK-BMN sebesar Rp51.244.143.985.314 atau data SAK **sama dengan** SIMAK-BMN.  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**, data SAK sebesar Rp14.875.078.623.669 dan SIMAK-BMN sebesar Rp14.875.078.623.669 atau data SAK **sama dengan** SIMAK-BMN.
- c) **Aset Lainnya**, sebelum penyusutan data SAK sebesar Rp3.252.431.356.657 dan SIMAK-BMN sebesar Rp11.864.749.108.122 atau terdapat perbedaan **SAK lebih rendah** sebesar Rp8.612.317.751.465.  
Secara rinci aset lainnya berupa :
- (1) Aset tidak berwujud, data SAK sebesar Rp144.335.155.657 dan data SIMAK-BMN sebesar Rp144.335.155.657 atau data SAK sama dengan SIMAK-BMN.
  - (2) Aset lain-lain, data SAK sebesar Rp3.108.096.201.000 dan data SIMAK-BMN sebesar Rp11.720.413.952.465 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp8.612.317.751.465.  
Perbedaan ini disebabkan :
    - (a) Aset/BMN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hasil pengadaan sebelum TA 2011 tidak disajikan dalam Aplikasi SAK namun tetap disajikan dalam SIMAK-BMN sebesar Rp8.613.207.662.516.
    - (b) Terdapat Aset finansial pada SAK yang tidak disajikan dalam SIMAK-BMN sebesar Rp889.911.051 pada RS.H. Adam Malik Medan.
- Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**, data SAK sebesar Rp2.002.528.379.785 dan SIMAK-BMN sebesar Rp8.643.299.549.480 atau terdapat perbedaan **SAK lebih rendah** sebesar Rp6.640.771.169.695, hal ini terjadi karena aset/BMN pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hasil pengadaan sebelum TA 2011, tidak disajikan pada Aplikasi SAK namun tetap disajikan dalam SIMAK-BMN.
- d) **Total Aset**, sebelum penyusutan data SAK sebesar Rp56.136.834.414.529 dan SIMAK-BMN sebesar Rp64.773.389.407.594 atau terdapat perbedaan data **SAK lebih rendah** sebesar Rp8.636.554.993.065. Perbedaan disebabkan :
  - (1) Persediaan, data SAK lebih rendah sebesar Rp24.237.241.600
  - (2) Aset Lainnya berupa aset lain-lain, data SAK lebih rendah sebesar Rp8.612.317.751.465.

**Total Akumulasi Penyusutan**, data SAK sebesar Rp16.877.607.003.454 dan SIMAK-BMN sebesar Rp23.518.378.173.149 atau terdapat perbedaan **SAK lebih rendah** sebesar Rp6.640.771.169.695. Perbedaan ini terjadi karena aset/BMN pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hasil pengadaan sebelum TA 2011 yang disajikan pada SIMAK-BMN sebesar Rp8.613.207.662.516 telah mengalami penyusutan sebesar Rp6.640.771.169.695.

**Total Aset setelah penyusutan**, data SAK sebesar Rp39.259.227.411.075 (Rp56.136.834.414.529 – Rp16.877.607.003.454) dan data SIMAK-BMN sebesar Rp41.255.011.234.445 (Rp64.773.389.407.594 – Rp23.518.378.173.149) atau terdapat perbedaan data SAK lebih rendah sebesar Rp1.995.783.823.370.

- e. **Aset Lain-lain**, selain aset finansial (hanya disajikan di SAK) dibandingkan dengan SIMAK-BMN, selisihnya adalah aset/BMN Satker Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) hasil pengadaan sebelum tahun 2011 yang tidak disajikan pada SAK, dengan rincian masing-masing Unit Eselon I. sebagai berikut :

Kode	Unit Eselon I	SAK	SIMAK-BMN	Selisih
01	Sekretariat Jenderal	95.126.474.463	707.797.554.003	(612.671.079.540)
02	Inspektorat Jenderal	14.908.500	14.908.500	-
03	Ditjen Bina Gizi dan KIA	98.297.106.001	845.939.639.801	(747.642.533.800)
04	Ditjen Bina Upaya Kesehatan	1.638.595.387.876	8.713.863.254.275	(7.075.267.866.399)
05	Ditjen PP dan PL	413.839.607.533	522.612.528.558	(108.772.921.025)
07	Ditjen Binfar dan Alkes	14.467.038.108	63.537.556.086	(49.070.517.978)
11	Badan Litbang Kesehatan	9.856.939.610	9.856.939.610	-
12	Badan PPSDM Kesehatan	837.008.827.858	856.791.571.632	(19.782.743.774)
	<b>TOTAL</b>	<b>3.107.206.289.949</b>	<b>11.720.413.952.465</b>	<b>(8.613.207.662.516)</b>

**Aset Lain-lain** yang berasal dari aset/BMN Satker Dekon dan TP hasil pengadaan sebelum tahun 2011, dengan nilai perolehan sebesar Rp8.613.207.662.516, telah mencapai nilai penyusutan sebesar Rp6.640.771.169.695 atau 77,10%, dan Nilai Buku sebesar Rp1.972.436.492.821 atau 22,90%, dengan rincian masing-masing Unit Eselon I, sebagai berikut :

Kode	Unit Eselon I	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku
01	Sekretariat Jenderal	612.671.079.540	530.708.700.188	81.962.379.352
03	Ditjen Bina Gizi dan KIA	747.642.533.800	648.785.849.140	98.856.684.660
04	Ditjen Bina Upaya Kesehatan	7.075.267.866.399	5.344.500.716.878	1.730.767.149.521
05	Ditjen PP dan PL	108.772.921.025	88.855.224.660	19.917.696.365
07	Ditjen Binfar dan Alkes	49.070.517.978	12.727.815.915	36.342.702.063
12	Badan PPSDM Kesehatan	19.782.743.774	15.192.862.914	4.589.880.860
	<b>TOTAL</b>	<b>8.613.207.662.516</b>	<b>6.640.771.169.695</b>	<b>1.972.436.492.821</b>
			77,10%	22,90%

Rincian data Aset/BMN Dekon dan TP hasil pengadaan sebelum tahun 2011 per Satker, disajikan pada Buku Laporan Keuangan Pendukung.

**7) Realisasi Belanja Modal Tahun 2014.**

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) sebesar Rp3.279.031.958.997 terdiri dari :

- a) Realisasi Belanja transaksi Kas (SP2D) sebesar Rp3.277.363.191.715
- b) Realisasi Belanja transaksi Non Kas Rp1.668.767.282.

Mutasi penambahan BMN bersumber belanja modal dan belanja barang dari transaksi kas SP2D sebesar Rp3.298.774.838.559, dengan rincian sesuai transaksi BMN sebagai berikut :

- ✓ 101 Pembelian Aset Tetap, sebesar Rp 2.162.383.336.408.
- ✓ 101 Pembelian Aset Tak Berwujud, sebesar Rp18.057.960.874
- ✓ 113 Penyelesaian Pembangunan Langsung, sebesar Rp19.928.790.882.
- ✓ 202 Pengembangan Nilai Aset Tetap, sebesar Rp98.801.246.098.
- ✓ 202 Pengembangan Nilai Aset Tak Berwujud, sebesar Rp3.528.024.490
- ✓ 502 Perolehan/Penambahan KDP, sebesar Rp138.629.258.846
- ✓ 503 Pengembangan KDP, sebesar Rp857.446.220.961.

**8) Koreksi Laporan Keuangan Kemenkes TA 2014.**

Laporan Keuangan Kemenkes TA 2014 setelah diaudit oleh BPK RI, mengalami perubahan/koreksi audit (internal dan Tim BPK) berupa penambahan dan pengurangan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Kemenkes per 31 Desember 2014.

**Langkah-langkah koreksi :**

Pada prinsipnya temuan hasil pemeriksaan Tim BPK setelah dilakukan penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada Satker terkait sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat Satker dan disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan.

**Beberapa hal yang dilakukan koreksi/penyesuaian mencakup :**

- 1) Target dan Realisasi Pendapatan PNBPN yang belum masuk laporan
- 2) Pagu dan Realisasi Belanja yang belum masuk laporan, termasuk adanya dokumen SPHL yang baru terbit atas penggunaan dana hibah langsung.
- 3) Pendapatan dan Belanja Satker BLU yang baru mendapatkan pengesahan dari KPPN setempat.
- 4) Koreksi internal yang dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon I.
- 5) Koreksi penambahan/pengurangan nilai pada Akun Neraca sesuai data/dokumen sumber hasil pemeriksaan Tim BPK RI.
- 6) Penyesuaian penyajian saldo dana Jamkesmas tahun 2013 yang belum disetorkan ke Kas Negara, pada akun "Dana Dibatasi Penggunaannya"
- 7) Koreksi terkait data BMN, yaitu :
  - a) Koreksi akuntansi atas barang rusak berat yang belum dientry dalam daftar barang rusak
  - b) Nilai Persediaan Kurang saji, berdasarkan hasil cek fisik
  - c) Koreksi hasil dropping BMN kepada SKPD yang masih tercatat dalam Aset Tetap yang tidak digunakan
  - d) Koreksi kurang dan/atau lebih saji Aset Tetap
  - e) Reklasifikasi Persediaan menjadi Aset Lain-lain, karena proses hibah yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun 2014
  - f) Koreksi kurang dan/atau lebih saji nilai KDP terkait kapitalisasi dan prosentase penyelesaian pekerjaan.
  - g) Penyesuaian Nilai Penyusutan sesuai Dasar Perhitungan Penyusutan dengan metode yang baru berdasarkan PMK 90/2014.

Tabel perbandingan data *Unaudited* dengan *Audited* meliputi : Estimasi dan Realisasi PNBP, Anggaran dan Realisasi Belanja, dan Neraca per 31 Desember 2014, disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.  
Ringkasan Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2014  
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

Unit Eselon I	Audited		Unaudited		Koreksi	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
Sekretariat Jenderal	6.706.400.000	13.596.777.377	6.706.400.000	13.596.777.377	-	-
Inspektorat Jenderal		91.795.059		91.795.059	-	-
Ditjen Bina Gizi KIA	565.320.000	8.180.345.608	565.320.000	8.028.181.845	-	152.163.763
Ditjen Bina Upaya Kes.	7.011.100.408.000	8.949.781.673.152	7.114.956.015.000	8.934.543.865.995	(103.855.607.000)	15.237.807.157
Ditjen PP dan PL	119.452.379.450	233.179.888.625	119.452.379.450	233.287.068.625	-	(107.180.000)
Ditjen Binfar dan Alkes	17.850.000.000	31.020.333.740	17.850.000.000	31.025.583.740	-	(5.250.000)
Badan Litbang Kesehatan	1.331.731.000	3.698.225.306	1.331.731.000	3.698.225.306	-	-
Badan PPSDM Kesehatan	515.916.429.500	562.724.128.901	515.916.429.500	558.885.955.816	-	3.838.173.085
<b>TOTAL</b>	<b>7.672.922.667.950</b>	<b>9.802.273.167.768</b>	<b>7.776.778.274.950</b>	<b>9.783.157.453.763</b>	<b>(103.855.607.000)</b>	<b>19.115.714.005</b>
					-1,34%	0,20%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas :

- Estimasi PNBP Kemenkes TA 2014, mengalami koreksi pengurangan sebesar Rp103.855.607.000 atau berkurang 1,34%, terjadi pada Unit Eselon I Ditjen BUK, berupa : penambahan sebesar Rp21.157.663.000 dan pengurangan sebesar Rp125.013.270.000.
- Realisasi PNBP Kemenkes TA 2014, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp19.115.714.005 atau bertambah 0,20%, dengan rincian : Koreksi penambahan sebesar Rp21.605.882.222 dan koreksi pengurangan sebesar Rp2.490.168.217.

Tabel 6.  
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014  
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

Unit Eselon I	Audited		Unaudited		Koreksi	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Sekretariat Jenderal	27.209.858.124.000	26.664.017.815.057	27.208.408.119.000	26.662.513.020.057	1.450.005.000	1.504.795.000
Inspektorat Jenderal	92.926.900.000	71.617.850.937	92.926.900.000	71.617.850.937	-	-
Ditjen BinaGizi dan KIA	1.961.480.949.000	1.713.442.758.687	1.961.480.949.000	1.708.941.531.117	-	4.501.227.570
Ditjen Bina Upaya Kesehatan	13.912.316.942.000	12.588.569.800.278	13.898.655.005.000	12.559.772.680.519	13.661.937.000	28.797.119.759
Ditjen PP dan PL	2.446.177.879.000	2.451.174.301.786	2.446.177.879.000	2.449.984.229.406	-	1.190.072.380
Ditjen Binfar dan Alkes	1.773.516.255.000	1.470.785.583.599	1.773.516.255.000	1.461.950.591.599	-	8.834.992.000
Badan Litbang Kesehatan	527.332.872.000	434.999.424.056	518.027.395.000	418.248.622.419	9.305.477.000	16.750.801.637
Badan PPSDM Kesehatan	2.432.179.345.000	2.077.128.379.492	2.428.446.769.000	2.072.612.520.917	3.732.576.000	4.515.868.575
<b>TOTAL</b>	<b>50.355.789.266.000</b>	<b>47.471.735.913.892</b>	<b>50.327.639.271.000</b>	<b>47.405.641.046.971</b>	<b>28.149.995.000</b>	<b>66.094.866.921</b>
					0,06%	0,14%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas :

- a) Anggaran Belanja Kemenkes TA 2014, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp28.149.995.000 atau bertambah 0,06%, dengan rincian masing-masing Satker yaitu :
- Pusat Penanggulangan Krisis, bertambah sebesar Rp1.450.005.000
  - RS Cipto Mangunkusumo, bertambah sebesar Rp8.399.893.000
  - Balai Besar Labkes Surabaya, bertambah sebesar Rp3.600.165.000
  - Direktorat BUK Jiwa, bertambah sebesar Rp661.879.000
  - Dinkes Kabupaten Subang, bertambah sebesar Rp1.000.000.000
  - Pusat Humaniora Kebijakan Kes, bertambah sebesar Rp9.305.477.000
  - Poltekkes Semarang, bertambah sebesar Rp3.732.576.000.
- b) Realisasi Belanja Kemenkes TA 2014, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp66.094.866.921 atau bertambah 0,14%, dengan rincian masing-masing Satker yaitu :

No.	Kode	Nama Satker	Realisasi Belanja TA 2014		
			Unaudited	Audited	Koreksi
1	465791	DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN	22.675.276.564	35.287.021.021	12.611.744.457
2	416202	PUS. HUMANIORA KEBIJAKAN KES & PEMBERDAYA MASY. SURABAYA	47.442.956.605	56.453.139.112	9.010.182.507
3	465895	SET DIT. JEN. BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	55.458.387.701	64.293.379.701	8.834.992.000
4	415423	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	1.383.019.793.845	1.391.419.687.657	8.399.893.812
5	416160	PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN	86.711.570.954	92.994.741.954	6.283.171.000
6	466034	DIREKTORAT BINA GIZI MASYARAKAT	68.442.178.817	72.895.015.547	4.452.836.730
7	632242	POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	95.955.865.997	99.688.442.697	3.732.576.700
8	415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	21.132.190.985	24.732.355.985	3.600.165.000
9	415520	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALAT ANGERANG	70.644.632.342	72.450.234.578	1.805.602.236
10	416176	PUSAT TEKNOLOGI INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT	52.055.244.862	53.512.692.992	1.457.448.130
11	625922	PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS	38.553.837.940	40.003.842.940	1.450.005.000
12	560127	BBTKL DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA	19.565.949.310	20.753.221.690	1.187.272.380
13	465782	DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN JIWA	13.390.949.110	14.052.828.110	661.879.000
14	465760	DIT. BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KES	16.109.011.649	16.691.409.649	582.398.000
15	632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	39.906.099.112	40.461.313.805	555.214.693
16	415624	RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	534.360.305.709	534.771.292.465	410.986.756
17	415542	RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG	116.422.939.314	116.798.939.314	376.000.000
18	548890	RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	516.734.191.335	517.047.050.242	312.858.907
19	637617	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	7.278.091.899	7.532.360.081	254.268.182
20	339175	DINAS KESEHATAN KAB. MANOKWARI	6.429.200.000	6.529.200.000	100.000.000
21	466040	PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN	23.337.518.258.137	23.337.573.048.137	54.790.000
22	415706	RSPI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA	91.547.407.582	91.574.651.173	27.243.591
23	415485	RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG	57.458.002.854	57.467.183.854	9.181.000
24	632160	POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	39.394.741.344	39.400.540.344	5.799.000
25	059008	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	6.709.166.160	6.711.966.160	2.800.000
26	415479	RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	770.783.168.773	770.783.178.773	10.000
		<b>JUMLAH</b>			<b>66.179.319.081</b>
1	159229	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	2.123.260.600	2.123.148.040	-112.560
2	039435	DINAS KESEHATAN KAB. SEMARANG	2.396.930.500	2.396.345.900	-584.600
3	199414	DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO	2.747.250.900	2.746.488.900	-762.000
4	415582	RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	687.056.499.803	687.055.656.803	-843.000
5	219181	DINAS KESEHATAN KAB. MALUKU TENGAH	6.769.760.900	6.758.860.900	-10.900.000
6	339217	DINAS KESEHATAN KOTA SORONG	1.681.800.000	1.663.500.000	-18.300.000
7	059587	DINAS KESEHATAN KAB. TRENGGALEK	2.011.331.200	1.990.381.200	-20.950.000
8	637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	81.030.888.339	80.998.888.339	-32.000.000
		<b>JUMLAH</b>			<b>-84.452.160</b>
		<b>JUMLAH PENAMBAHAN</b>			<b>66.094.866.921</b>

Ringkasan hasil koreksi Neraca per 31 Desember 2014 masing-masing Unit Eselon I, sebagai berikut :

Kode	Unit Eselon I	31-Des-14	Koreksi Audit		31-Des-14
		Unaudited	Debet	Kredit	Audited
01	Sekretariat Jenderal	1.790.383.602.567	1.466.368.335	15.919.632.974	1.775.930.337.928
02	Inspektorat Jenderal	7.646.377.741	-	-	7.646.377.741
03	Ditjen Bina Gizi & KIA	295.982.945.519	2.529.286.066	7.482.221.494	291.030.010.091
04	Ditjen Bina Upaya Kes.	30.500.653.570.373	767.570.868.395	440.389.872.680	30.827.834.566.088
05	Ditjen PP dan PL	3.287.870.319.408	242.094.541.355	123.676.987.480	3.406.287.873.283
07	Ditjen Binfar&Alkes	108.937.083.239	10.021.910.416	3.347.761.710	115.611.231.945
11	Badan Litbang Kes.	679.477.467.966	3.943.519.958	1.692.891.158	681.728.096.766
12	Badan PPSDM Kes.	6.245.528.454.449	8.551.757.696	67.736.232.458	6.186.343.979.687
<b>Jumlah</b>		<b>42.916.479.821.262</b>	<b>1.036.178.252.221</b>	<b>660.245.599.954</b>	<b>43.292.412.473.529</b>

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Neraca Kemenkes per 31 Desember 2014 (*Unaudited*) dengan total Aset sebesar Rp42.916.479.821.262 mengalami koreksi/penyesuaian hasil audit berupa penambahan sebesar Rp1.036.178.252.221 dan pengurangan sebesar Rp660.245.599.955, sehingga Neraca Kemenkes per 31 Desember 2014 (*Audited*) menjadi sebesar Rp43.292.412.473.529.

Berikut diuraikan koreksi/penyesuaian hasil audit atas Neraca per 31 Desember 2014 masing-masing Unit Eselon I, yaitu :

- 1) Ditjen Bina Upaya Kesehatan, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp767.570.868.395 dan pengurangan sebesar Rp440.389.872.680
- 2) Ditjen PP dan PL, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp242.094.541.355 dan pengurangan sebesar Rp123.676.987.480
- 3) Ditjen Binfar dan Alkes, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp10.021.910.416 dan pengurangan sebesar Rp3.347.761.710
- 4) Badan PPSDM Kesehatan, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp8.551.757.696 dan pengurangan sebesar Rp67.736.232.458
- 5) Badan Litbang Kesehatan, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp3.943.519.958 dan pengurangan sebesar Rp1.692.891.158
- 6) Ditjen Bina Gizi dan KIA, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp2.529.286.066 dan pengurangan sebesar Rp7.482.221.494
- 7) Sekretariat Jenderal, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp1.466.368.335 dan pengurangan sebesar Rp15.919.632.974.
- 8) Inspektorat Jenderal, TIDAK mengalami koreksi audit.



Ringkasan Neraca Kemenkes per 31 Desember 2014 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut :

Tabel 7.  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014  
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

Akun	31 Desember 2014		Koreksi
	Audited	Unaudited	
Aset			
Aset Lancar	5.619.539.386.566	5.375.558.444.819	243.980.941.747
Aset Tetap	36.369.065.361.645	36.276.333.457.159	92.731.904.486
Piutang Jangka Panjang	748.643.516	748.643.516	-
Aset Lainnya	1.303.059.081.802	1.263.839.275.768	39.219.806.034
<b>Jumlah Aset</b>	<b>43.292.412.473.529</b>	<b>42.916.479.821.262</b>	<b>375.932.652.267</b>
Kewajiban			-
Kewajiban Jangka Pendek	1.016.936.107.723	978.989.777.807	37.946.329.916
Ekuitas Dana			-
Ekuitas Dana Lancar	4.602.603.278.843	4.396.568.667.012	206.034.611.831
Ekuitas Dana Investasi	37.672.873.086.963	37.540.921.376.443	131.951.710.520
Jumlah Ekuitas Dana	42.275.476.365.806	41.937.490.043.455	337.986.322.351
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>43.292.412.473.529</b>	<b>42.916.479.821.262</b>	<b>375.932.652.267</b>
			<b>0,88%</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas Neraca Kemenkes per 31 Desember 2014, yaitu terdapat penambahan aset sebesar Rp375.932.652.267 atau bertambah 0,88%, dengan komposisi masing-masing yaitu :

- 1) Aset Lancar, bertambah sebesar Rp243.980.941.747 atau 4,54%
- 2) Aset Tetap (Netto), bertambah sebesar Rp92.731.904.486 atau 0,26%
- 3) Aset Lainnya (Netto) bertambah sebesar Rp39.219.806.034 atau 3,10%
- 4) Kewajiban bertambah sebesar Rp37.946.329.916 atau 3,88%
- 5) Ekuitas dana bertambah sebesar Rp337.986.322.351 atau 0,81%.